



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UNGGUL PRIYANTO
2. Jabatan : KOMISARIS UTAMA
3. NHK : 64488

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.946.475.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 642.900.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 477 m2/268 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.303.575.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 477.400.000

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 159.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV BR-V DG3 1.5L PRES SE CVT N7X Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 318.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 455.000.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. 335.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.310.655.383

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.524.530.383

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.524.530.383

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.